

## **PERKEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL DAN PERAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)**

Oleh : Rohailia Yusof

*(Fakultas Pengurusan dan Ekonomi UPSI Malaysia)*

### **Abstract**

This paper discusses about the advantages and disadvantages which happen in the national industries as a result of the dominant of foreign investment Indonesia has been losing the momentum of development of its nation industries. From the 1970s until 1980s. Indonesia had the opportunity to take control of industries in the Asian region, especially as China. Malaysia, and Thailand had still not developed their power to build and develop their industries.

Without a good infrastructure and a good logistic, qualified human resources, ability to control technology which support dynamic innovational activity and intensive cooperation between universities and business world, Indonesia will be left behind by any industri from any other country. This paper result, foreign investment is important for the development of industries. Indonesia must try to absorb the advantages deriving from foreign investment. Therefore domestic companies in Indonesia will not only become the medium but also would be able to absorb the new technology associated with foreign investment.

### **A. Pendahuluan**

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia sempat mendapat julukan calon Macan Asia, karena perubahan struktur ekonominya yang signifikan dari sebuah negara agraris menjadi negara industri baru, dengan industri manufaktur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah waktu itu berhasil menciptakan proses pembangunan ekonomi yang pesat, membuat Indonesia sebagai negara industri yang menjanjikan di Asia Tenggara.

Strategi yang dilakukan pemerintah waktu itu adalah mengundang investor asing, khususnya investasi jangka panjang/langsung (PMA), yang diharapkan bisa mendorong pembangunan industri manufaktur. Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) ini awalnya didukung oleh kebijakan substitusi impor dan kemudian pada tahun

1980-an diubah menjadi kebijakan promosi ekspor. Maka pada tahun 1980-an PMA diarahkan ke industri-industri yang berorientasi ekspor.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan industri nasional, khususnya manufaktur pada era Soeharto tidak bisa lepas dari PMA, khususnya perusahaan-perusahaan *multinasional* (MNCs). Pada era ini banyak industri bermunculan, baik dalam bentuk patungan antara perusahaan lokal dengan MNCs, maupun sepenuhnya MNCs. Banyak lahir pula perusahaan lokal sebagai pemasok input pada MNCs, walaupun masih relatif lemah dibanding negara lain. Ketergantungan pada PMA dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan industri nasional jangka panjang. Ini sama halnya dengan ketergantungan negara pada pinjaman luar negeri (*foreign loan*) untuk mendanai pembangunan dalam negeri, yang akan berakibat semakin lemahnya negara tersebut dalam jangka panjang.

Tulisan ini memaparkan tentang keuntungan dan kerugian yang bisa terjadi terhadap industri nasional dengan kehadiran atau dominasi penanaman modal asing (PMA). Karena keterbatasan data, sebagian besar pembahasan didasarkan pada survei literatur.

## **B. Perkembangan Industri Nasional dalam 10 Tahun Terakhir.**

Dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan industri ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu: diversifikasi dan pendalaman struktur industri.

Aspek pertama (struktur horizontal), pertanyaannya yaitu: industri hilir apa saja yang ada di Indonesia?, atau berapa macam produk yang dihasilkan oleh industri nasional? Pada tabel 1 dan tabel 2 kita bisa memahami bahwa tingkat diversifikasi menurut jenis barang yang dihasilkan oleh industri nasional cukup tinggi. Jika data pada tabel dua digit yang digunakan. Variasinya bisa lebih besar lagi. Misalnya kelompok tekstil terdapat bermacam produk kain, atau dalam kelompok pakaian jadi ada kemeja, celana, jaket, kancing, benang, T shirt, resleting, dan lain sebagainya.

Proses pembangunan ekonomi jangka panjang biasanya membawa suatu perubahan struktur ekonomi atau suatu transisi ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis non pertanian. Sehingga pembangunan ekonomi berjalan searah dengan perkembangan industri. Hipotesis yang bisa dibuat adalah suatu korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita (indikator utama kemajuan pembangunan ekonomi) dan tingkat diversifikasi produk (indikator perkembangan industri) tersebut.

Diversifikasi juga dapat didasarkan menurut kategori barang, yang secara umum ada tiga kategori: 1) konsumsi (produk akhir): makanan, minuman, tembakau, pakaian jadi, radio, TV, dsb. 2) perantara (produk setengah jadi): produk dari karet, plastik, kimia bukan tujuan konsumsi, dan 3) modal: seperti mesin dan alat

transportasi. Tabel 1 dan 2 menunjukkan Indonesia tidak hanya membuat barang-barang konsumsi saja tetapi juga barang-barang untuk keperluan produksi. Hipotesisnya: suatu korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita dan total output dari industri barang modal (sebagai persentase dari total output dari sector industri pengolahan)

Diversifikasi menurut kategori barang juga memberikan indikasi lain yaitu kemampuan teknologi dari industri nasional. Teknologi yang terkandung di dalam barang modal secara umum lebih kompleks atau canggih dibanding barang konsumsi. Meskipun pada setiap kategori barang tersebut terdapat sub-sub kategori menurut jenis dan derajat kompleksitas dari teknologi yang terkandung di dalamnya. Contohnya tekstil mengandung teknologi yang lebih sederhana dibanding dengan alat-alat elektronik rumah tangga.

Dalam aspek ke dua (struktur vertikal) pertanyaannya yaitu: apakah barang-barang jadi yang di buat Indonesia mengandung lebih banyak kandungan lokal ataukah impor?. Atau apakah setiap barang yang dibuat di Indonesia memiliki struktur industri vertikal dari hulu ke hilir? Industri otomotif (industri hilir), mempunyai keterkaitan produk ke belakang tidak saja dengan industri tengah yang membuat komponen otomotif, tetapi juga dengan kelompok industri hulu seperti industri baja. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kedalaman struktur industri nasional adalah rasio dari nilai input yang diimpor terhadap nilai output yang dihasilkan (tingkat ketergantungan impor) dari masing-masing industri yang ada di Indonesia. Hipotesisnya yaitu: semakin maju industri nasional semakin dalam struktur industrinya.

Meskipun keterbatasan data untuk menunjukkan kemajuan industri nasional dari dua aspek pandang tersebut, namun suatu kejelasan bahwa awal orde baru hingga sekarang tingkat diversifikasi industri nasional mengalami peningkatan yang pesat. Kendati belum menandakan industri nasional berkembang secara mandiri. Keberadaan PMA menimbulkan munculnya industri-industri hilir, termasuk industri otomotif pada awal tahun 1970-an dengan PT Astra Internasional (PMA Jepang). Banyak industri hilir di Indonesia sebenarnya proses perakitan dari produk-produk merek luar negeri, bukan produksi dalam arti yang sesungguhnya, seperti produk Lokomotif Kereta Api Nusantara.

MNCs lebih tertarik pada industri hilir dari pada industri tengah atau industri hulu, karena industri hilir lebih menguntungkan, di mana pembelinya lebih potensial dari pada pembeli barang-barang antara dan modal. Mereka sudah memiliki merek-merek yang dikenal dunia, dan masuk ke Indonesia karena tenaga kerja murah dan pasar yang menjanjikan (luas), atau karena bahan baku/sumber daya produksi (SDP)

banyak tersedia dan murah, dari pada ekspor dari negara asal mereka. Banyak MNCs memanfaatkan Indonesia sebagai basis ekspor ke negara-negara sekitar. Sebaliknya pertumbuhan industri tengah dan hulu masih relatif rendah dibanding laju pertumbuhan industri hilir. Ini merupakan hasil dari kesalahan pada awal industrialisasi Orde Baru yang lebih fokus pada industri hilir dengan penekanan pada perakitan yang didukung oleh kebijakan substitusi impor. Sebenarnya kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan kandungan lokal. Tetapi hingga saat ini Indonesia belum berhasil membangun pola industri seperti di Jepang, yang industrinya memiliki keterkaitan kuat mulai dari hulu sampai hilir (Tulus Tambunan, 2007).

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Skala Menengah dan Besar di Industri Nasional Dirinci Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Sektor Industri (KBLI) 2 digit

KKBLI		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Makanan dan Minuman	4.559	4.552	4.414	4.638	4.721	6.615	6.495	6.316
2.	Pengolahan Tembakau	810	814	788	810	858	1.286	1.245	1.483
3.	Tekstil	1.901	1.892	1.847	1.889	1.834	2.809	3.067	2.701
4.	Pakaian Jadi	2.123	2.028	1.883	1.908	1.922	3.256	3.142	2.349
5.	Kulit dan Produk 2 dari kulit (alas kaki)	564	533	612	493	491	813	783	737
6.	Kayu dan Produk dari kayu, bambu, dan sejenisnya (seperti anyaman)	1.668	1.629	1.450	1.411	1.325	1.782	1.703	1.702
7.	Kertas dan Produk dari kertas dan sejenisnya	388	340	375	391	413	526	486	457
8.	Penerbitan, percetakan, media rekaman	537	593	545	551	545	897	972	727
9.	Barang2 dari batubara, minyak/gas, bb. nuklir	48	40	54	48	52	73	59	55
10.	Kimia dan produk2 dari kimia	1.089	1.014	1.003	1.017	1.011	1.179	1.141	1.253
11.	Karet, produk dari karet, plastic	1.416	1.463	1.422	1.482	1.477	1.847	1.792	1.881
12.	Barang galian bukan logam	1.657	1.614	1.518	1.507	1.523	2.047	1.955	1.965
13.	Logam Dasar	239	223	209	231	211	278	319	261
14.	Barang dari logam, kecuali mesin +peralatannya	908	932	896	880	880	1.020	1.003	854
15.	Mesin dan perlengkapannya	529	474	390	407	407	477	469	383
16.	Mesin dan peralatan kantor, akuntansi dsb	9	9	8	7	7	10	13	10
17.	Mesin listrik lain dan peralatannya	235	244	247	248	252	279	267	290
18.	Radio, TV, Peralatan komunikasi dan perk.	141	166	206	220	191	227	230	273
19.	Peralatan kedokteran, navigasi, optic, alat ukur, jam dan lonceng	89	52	49	46	47	61	57	62
20.	Kendaraan bermotor	216	270	256	262	262	336	320	366
21.	Alat angkutan, selain kend r motor roda empat/lebih	354	329	334	322	297	380	345	431
22.	Mebel dan industri pengolahan lainnya	1.914	1.898	1.855	1.851	1.865	3.135	1.967	3.196
23.	Daur ulang	24	28	63	66	55	137	120	54
	Jumlah	21.396	21.147	20.324	20.685	20.728	29.468	28.970	27.808

Sumber: Pusdatin Depperin (Data diolah dari BPS)

Secara garis besar industri nasional hingga saat ini masih mengalami banyak kendala untuk mengembangkan industri tengah dan industri hulu yang berdaya saing

tinggi, di satu sisi, dan pada sisi lain untuk bisa lebih mandiri di dalam perkembangan industri hilir (tidak lagi sebagai tukang jahit MNCs), di sisi lain. Diantaranya; kurangnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya tingkat kewirausahaan, dan kurangnya perhatian pemerintah yang secara tegas dan konsisten mendukung perkembangan industri nasional.

Tabel 2. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Industri Menurut Kelompok Industri (%)

Kelompok Industri	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Makanan, Minuman, Tembakau	20,5	3,1	6,7	11,3	32,7	16,9	26,2
Tekstil, kulit & alas kaki	29,1	4,3	2,7	0,5	47,1	3,9	27,0
Kayu & produk hutan	5,4	-3,8	-4,6	-8,5	-8,6	23,2	-12,5
Kertas & percetakan	36,8	11,9	7,9	0,03	27,7	7,7	17,4
Pupuk, kimia, karet, plastik, & produk <sup>2</sup> nya	11,9	19,3	9,0	16,8	34,0	29,7	21,6
Semen & bahan galian non logam	0,7	2,5	21,7	15,5	-1,6	27,1	51,2
Mesin/listrik/non listrik & peralatannya	53,0	-6,1	43,9	20,4	21,1	8,4	2,2
Alat transportasi	50,6	-0,5	16,8	32,4	13,8	21,3	-6,3
Logam dasar dan produk-produknya	-0,1	3,6	11,8	5,0	41,8	20,8	7,2
Meubel dan industri pengolahan lainnya	14,7	10,3	7,2	5,1	70,2	13,2	25,2
Semua industri pengolahan non-migas	16,3	5,4	9,8	10,5	29,7	16,3	19,3

Sumber: BPS

### **C. Perkembangan PMA Pada Industri Nasional Dalam 10 Tahun Terakhir**

Sejak diberlakukannya UU Penanaman Modal pada awal Orde baru hingga sekarang, pertumbuhan PMA di Indonesia sangat pesat, walaupun pernah menurun pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Dengan pasar domestik yang luas, upah tenaga kerja yang murah, dan ketersediaan sumber daya alam, Indonesia sangat menarik bagi PMA. Sejak reformasi sampai saat ini Indonesia mengalami banyak tantangan dalam persaingan menarik PMA. Tantangan yang pertama; banyak negara lain di Asia pada saat era Soeharto belum menarik bagi PMA, tetapi sekarang menjadi pasar yang menjanjikan. Misalnya: Cina, dan India, Thailand yang memiliki penduduk besar di samping peningkatan pendapatan per kapitanya yang pesat. Kedua; banyak negara lain seperti Cina, Vietnam, dan Thailand sikap pemerintahannya yang proaktif, serius dan konsisten dibanding pemerintah Indonesia dalam menarik PMA. Pembangunan infrastruktur, jaminan keamanan, dan kepastian hukum jauh lebih baik

di ketiga negara tersebut dari pada Indonesia. Ketiga; berbeda dengan era tahun 1980-an atau sebelumnya, sekarang banyak PMA diberbagai industri yang tidak hanya mementingkan tenaga kerja murah, tetapi juga tenaga kerja yang berkualitas. Ketiga negara tersebut saat ini menawarkan tenaga kerja murah, disiplin, etos kerja tinggi, dan berkemampuan tinggi dalam penguasaan teknologi.

Tabel 3. Perkembangan PMA dan PMDN di Indonesia

TAHUN	PMDN		PMA	
	PROYEK**	NILAI (RP MILIAR)	PROYEK	NILAI (US\$ JUTA)
1990	253	2.398,6	100	706,0
1991	265	3.666,1	149	1.059,7
1992	225	5.067,4	155	1.940,9
1993	304	8.286,0	183	5.653,1
1994	582	12.786,9	392	3.771,2
1995	375	11.312,5	287	6.898,4
1996	450	18.609,7	357	4.628,2
1997	345	18.628,8	331	3.473,4
1998	296	16.512,5	412	4.865,7
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	442	3.082,8
2003	120	12.247,0	569	5.445,3
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.363,4	869	5.9991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4
2009	190	221.628,3	1.232	1.970,9

Sumber: BKPM

Produk tertentu yang padat karya dengan teknologi sederhana, dan permintaan dalam negeri besar (tekstil, pakaian jadi, makanan, minuman, alas kaki) Indonesia masih mempertahankan keunggulan komparatifnya. Tetapi untuk produk berteknologi tinggi (mobil, motor, alat kantor, komputer, dan sejumlah barang elektronik),

Indonesia sudah mulai kehilangan daya tariknya sebagai basis produksi bagi banyak MNCs. Contohnya: Microsoft akhirnya memilih India sebagai salah satu basis produksinya di luar US, dan Thailand terpilih sebagai pusat produksi mobil Jepang untuk pasar Asia Tenggara.

Jika kita perhatikan Tabel 3, perkembangan PMA relatif baik dibandingkan perkembangan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di luar sektor minyak, gas, batu bara, dan keuangan. Dalam jumlah proyek baru PMA meningkat setiap tahun. Namun demikian Indonesia masih termasuk sangat kecil sebagai negara penerima PMA, khususnya setelah krisis moneter 1997/1998 lalu, posisi Indonesia saat ini di atas dua negara Filipina dan Vietnam, sehingga jika dibanding dengan Korea Selatan, Singapura, Cina, India dan Hongkong, Indonesia tidak kompetitif sebagai tujuan PMA. Pada tabel 3 pada halaman berikut, menunjukkan perkembangan PMA dan PMDN di Indonesia di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga finansial non bank, pertambangan dalam rangka kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, investasi yang perijinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, investasi portfolio dan investasi rumah tangga.

Tabel 4. Perkembangan Realisasi PMA Pada Industri Manufaktur Menurut Kelompok Industri

Kelompok Industri	2005		2006		2007		2008	
	P	I	P	I	P	I	P	I
Makanan, Minuman & Tembakau	46	603,2	45	354,4	63	704,1	42	491,4
Tekstil & Produk2ny (TPT)	31	71,1	61	424	63	131,7	67	210,2
Barang2 dari Kulit & Alas Kaki	8	47,8	11	51,8	10	95,9	20	145,8
Kayu & Produk-Produknya	18	75,5	18	58,9	17	127,9	19	119,5
Kertas dan Percetakan	6	9,9	16	747	11	672,5	15	294,7
Kimia dan Farmasi	41	1.152,9	32	264,6	32	1.611,7	42	627,8
Karet, Platik & Produk2nya	27	392,6	3	112,7	36	157,9	50	271,6
Mineral dan Logam	11	66,2	7	94,8	6	27,8	11	266,4
Logam, Mesin & Elektronik	87	521,8	86	955,2	99	714,1	141	1.281,4
Instru. Kedokteran, Presisi. Optik	2	3,1	1	0,2	1	10,9	7	15,7
Kend. Bermotor & Alat transport	31	360,6	28	438,5	38	412,3	47	756,2
Lainnya	29	195,9	25	117,1	24	30,2	34	34,7
Jumlah di Industri	335	3.500,6	363	3.619,2	390	4.697,0	495	4.515,2
Jumlah di Semua Sektor	907	8.911,0	869	5.991,7	982	10.341,4	1.138	14.871,4

Keterangan: P=Jumlah ijin usaha tetap yang dikeluarkan, I=nilai realisasi investasi dalam US\$

Sumber: BKPM

Tabel 4 menunjukkan struktur PMA menurut kelompok industri dua hal penting yaitu: 1) PMA lebih fokus pada industri hilir, khususnya barang konsumsi rumah tangga, karena lebih menguntungkan. Dengan membawa merek dagang sendiri MNCs

masuk ke Indonesia hanya karena pasarnya yang sangat luas, dan faktor produksi relatif murah. 2) di antara barang konsumsi, juga terjadi konsentrasi PMA, yaitu pada industri pakaian jadi dan tekstil, makanan, minuman dan tembakau, kendaraan bermotor, serta barang-barang elektronik. Dalam membedakan antara barang konsumsi dan nonkonsumsi pada data Tabel 4 tidak selalu mudah. Misalnya alat transportasi bisa untuk keperluan pribadi (mobil, motor) atau digunakan untuk antar-jemput pegawai perusahaan. Demikian pula alat-alat elektronik seperti komputer, spot light yang bisa dipakai pribadi atau untuk bisnis.

#### **D. Alasan Masuknya PMA Di Dalam Industri Nasional**

Ada dua isu penting yaitu: motivasi utama dan pertimbangan yang digunakan oleh sebuah perusahaan PMA dalam memilih negara tujuan yang banyak dibahas dalam berbagai literatur (studi manajemen, teori perdagangan internasional, dan teori investasi internasional). Literatur yang sangat terkenal dari Dunning (1977, 1993). Menurut Dunning alasan utama melakukan investasi di luar negeri adalah:

1. Mencari sumber daya produksi (SDP) yang tidak dimiliki di negerinya. Kalau toh memiliki harga sangat mahal dibanding di luar negeri.
2. Mencari pasar yang tidak dapat dilakukan dengan biaya murah lewat ekspor karena ada tarif impor yang tinggi di negara tujuan, atau biaya transportasi yang tinggi.
3. Mencari efisiensi: memanfaatkan keuntungan dari perbedaan dalam ketersediaan dan biaya SDP di negara yang berbeda, atau mengambil keuntungan dari skala ekonomis dan skop serta perbedaan dalam selera konsumen serta kemampuan suplai di berbagai negara (Bevan dan Estrin, 2000; Campos dan Kinoshita, 2003)
4. Mencari aset strategis yang hanya bisa didapat di negara lain. Misal PMA Eropa mencari basis teknologi baru di bidang penerbangan atau computer di USA. Jepang membuka perusahaan pakaian di Solo/Yogya untuk membuat pakaian bermotif batik, karena Jepang tidak menguasai tekniknya. Franco, dkk menyebut asset-aset seperti ini sebagai asset-aset non pasar, yang tidak mudah bisa dijual-belikan secara bebas (Cantwell dan Mudamdi, 2005; Franco, dkk, 2008)

Jika ada pertanyaan negara mana yang dipilih? Jawabnya: negara yang paling menguntungkan/memenuhi harapan PMA. Jika pertimbangannya mencari SDP (sumber daya produksi), maka Indonesia termasuk tujuan favorit, terutama pertambangan, pertanian, tenaga kerja murah. Tapi bagi tenaga kerja Indonesia yang murah saat ini menghadapi tantangan serius dari pesaing lain seperti India dan Cina, karena saat ini semakin banyak barang yang berbasis ilmu pengetahuan. Sementara kualitas tenaga kerja Indonesia lebih buruk dari kedua negara tersebut. Maka tak

mengerankan jikalau India sangat laku sebagai salah satu pusat pengembangan computer dan jasa berbasis informasi teknologi (IT), dan bukan Indonesia.

Dalam hal pasar, Indonesia, bersama India dan Cina adalah negara yang menjadi incaran bagi ekspor dan PMA, karena: 1) jumlah penduduknya yang sangat besar, 2) pendapatan per kapita yang meningkat, 3) sifat konsumtif masyarakat Indonesia, 4) produk modern yang berbau luar negeri sangat laku, 5) produk makanan yang berkualitas. Hal ini mendorong perusahaan asing yang memproduksi barang-barang tersebut akan memilih Indonesia sebagai salah satu basis produksi mereka. Di era globalisasi saat ini pasar domestik sudah tidak dominan lagi, karena kemajuan transportasi yang semakin murah dan informasi yang semakin mudah. Maka saat ini yang lebih penting adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Sehingga bagi Indonesia harus berbuat lebih banyak untuk menarik PMA, dan tidak mengandalkan jumlah penduduk yang besar. Boleh jadi MNCs yang ingin melayani pasar Indonesia beroperasi di Singapura (pabrik minyak kelapa sawit).

Dalam efisiensi, MNCs akan mencari lokasi di mana mereka bisa mengombinasikan antara asetnya yang bisa bergerak dengan asset lain yang dibutuhkan, tetapi yang mempunyai mobilitas tinggi. Konsekuensinya perbedaan biaya produksi, kondisi infrastruktur, kemudahan melakukan bisnis, ketersediaan SDM berkualitas. Dan birokrasi pemerintah yang efisien menjadi sangat menentukan suatu lokasi menjadi pilihan MNCs. Kesamaan kepemilikan SDA dengan Negara lain, Indonesia harus mengembangkan keistimewaan ekstra dalam memiliki SDA dibanding negara lain yang juga memiliki SDA. Misalnya pemerintah memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, infrastruktur yang baik, aksesibilitas sepenuhnya terhadap SDA, agar MNCs merasa nyaman beroperasi di Indonesia.

Dalam mencari aset strategis, seperti keahlian tradisional dalam membuat batik ukir, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara penting tujuan PMA. Letak geografis yang strategis di Asia Tenggara. Indonesia juga harus bersaing dengan Singapura dan Malaysia, dan tampaknya Indonesia semakin terkalahkan oleh kedua negara tersebut. Sementara dalam pengembangan teknologi modern, Indonesia akan semakin tergeser oleh posisi Cina, Thailand, Malaysia dan India. Pertimbangan ini PMA akan mencari universitas/lembaga R & D yang memiliki basis pengembangan teknologi dan inovasi (Jepang, Korea selatan, Cina, Malaysia, Taiwan, India). Motivasi lain perusahaan asing masuk di Indonesia yaitu membeli perusahaan lokal yang collapses karena kekurangan modal sehingga asetnya dibeli dengan harga yang murah.

Kebijakan perdagangan di negara tujuan juga mempengaruhi keputusan MNCs dalam menentukan lokasi produksinya negara yang memiliki kebijakan perdagangan bebas jauh lebih menarik bagi MNCs dibanding negara yang melaksanakan kebijakan protektif yang berorientasi ke dalam negeri. Sebenarnya Indonesia telah melaksanakan kebijakan perdagangan internasional yang liberalistik, namun saat ini juga harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan internasional (Cina, Singapura).

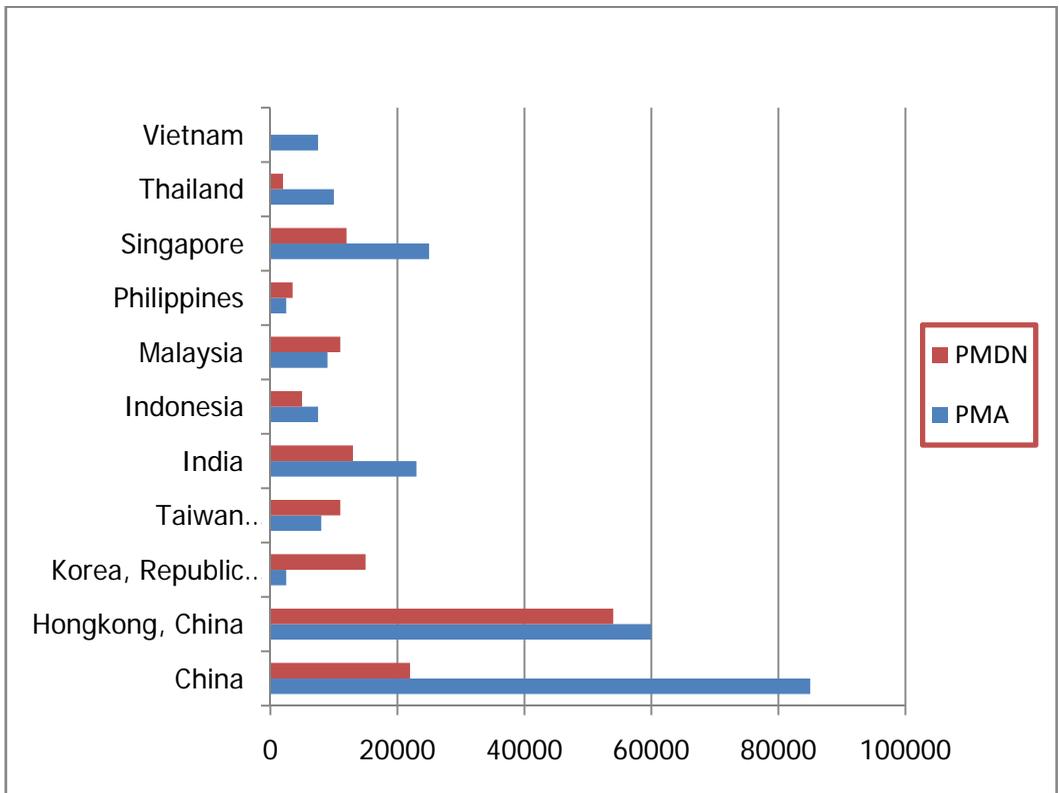
#### **E. Keterkaitan PMA Dengan Perusahaan Domestik**

Bukti keterkaitan produksi yang intensif antara perusahaan domestik dengan PMA akan terlihat dalam bentuk *subcontracting* di Indonesia yang sangat terbatas. Indonesia belum seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan yang industrinya telah maju, yang memiliki keterkaitan produksi baik antar sesama perusahaan domestik maupun dengan MNCs sudah sangat kuat. Seperti di Malaysia pada industri elektronik keterkaitan produksi antar-MNCs dan perusahaan pemasok lokal berkembang sangat pesat, dan didukung oleh pemerintah Malaysia agar perusahaan lokal memanfaatkan sepenuhnya keberadaan MNCs lewat keterkaitan produksi (Kanapathy, 2004).

Di Indonesia, meski upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem *subcontracting* antara sesama perusahaan lokal dengan MNCs di sektor industri, namun kenyataannya sistem keterkaitan produksi masih sangat lemah. Pada masa Orde Baru di dalam kebijakan industrialisasi pemerintah menerapkan peraturan kandungan lokal (*deletion program*) di sejumlah kelompok industri termasuk mesin, elektronik, dan otomotif sebagai bagian dari kebijakan substitusi impor. Namun kebijakan tersebut tidak menghasilkan keterkaitan produksi yang kuat terutama antara perusahaan lokal dengan MNCs. Padahal jika dengan keterkaitan produksi akan terjadi alih teknologi dari MNCs ke perusahaan lokal, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengembangan industri nasional.

Di Indonesia praktik *subcontracting* yang paling berhasil adalah pada industri otomotif oleh PT Astra Internasional. Perusahaan tersebut telah menjadikan sejumlah perusahaan lokal, terutama UKM sebagai pemasok komponen otomotif yang berkualitas. Dalam waktu singkat perusahaan lokal sudah mampu membuat berbagai jenis komponen dan onderdil untuk berbagai merek mobil dan motor Jepang sesuai standar kualitas yang ketat yang ditetapkan oleh PT Astra Internasional (Tulus Tambunan, 2000a, 2010). Ada yang berpendapat bahwa pada era Orde Baru keterkaitan produksi baik sesama perusahaan domestik maupun dengan PMA tidak berkembang lancar, karena distorsi pasar akibat intervensi pemerintah yang

berlebihan dan kekurangan tenaga kerja yang berkualitas serta rendahnya kemampuan teknologi perusahaan lokal, terutama UKM. Penyebab lain yaitu; masih lemahnya industri pendukung yang memasok komponen atau bagian tertentu dari produk yang dibuat MNCs atau belum adanya industri yang menghasilkan mesin dan peralatan produksi yang menghasilkan mesin dan peralatan yang kompetitif yang dapat digunakan oleh MNCs.



Sumber: Figure 7 dari ESCAP (2009)

Gambar 1. Arus Masuk PMA ke Sejumlah Negara di Asia dan Pasific's. 2007 (US\$juta)

#### **F. Keuntungan dan Kerugian Dominasi Asing dalam Industri Nasional**

Pertanyaan penting disini adalah "Apa dampak dari keberadaan PMA terhadap industri nasional? Karena pengertian "keuntungan" dan "kerugian" dari adanya PMA masih belum standar, maka cukup sulit pula untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah peningkatan ekspor Indonesia karena adanya PMA selama ini dianggap keuntungan, sementara PMA tersebut sedikit sekali memakai input atau komponen

buatan perusahaan domestik. Contoh yang paling baik untuk melihat keuntungan seperti ini walaupun tidak ada keterkaitan penuh dengan ekonomi dari negara tuan rumah adalah Hongkong, Singapura, Zon-Zon khusus di Malaysia. Mereka sejak awal berorientasi ekspor dan mengundang PMA tanpa ada keharusan bermitra dengan perusahaan lokal. Sedangkan negara-negara yang juga mengundang PMA tetapi dengan berbagai syarat, termasuk "kebijakan kandungan lokal" atau kebijakan kemitraan, adalah negara-negara Amerika Latin, Timur Tengah, dan sebagian Asia, termasuk Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar keberadaan PMA tidak hanya memberikan keuntungan langsung seperti pertumbuhan ekspor dan PDB yang berasal dari perusahaan-perusahaan PMA, tetapi juga keuntungan tidak langsung atau jangka panjang berupa alih teknologi dan pengetahuan, serta pembangunan berbasis industri nasional. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor, perluasan akses pasar internasional secara mandiri, dan memperbesar multiplier (efek pengganda) pertumbuhan ekonomi.

Keuntungan-keuntungan yang bisa diharapkan dari keberadaan PMA bagi industri nasional adalah;

1. Penambahan modal fisik.

Salah satu penyebab lemahnya perkembangan industri di banyak negara berkembang (NSB) adalah kekurangan peralatan dan mesin produksi. Jadi penambahan jumlah modal fisik pada industri nasional dapat didefinisikan sebagai jumlah modal fisik domestik ditambah jumlah modal fisik dari MNCs. Atau hipotesisnya semakin banyak PMA semakin banyak modal fisik pada industri nasional.

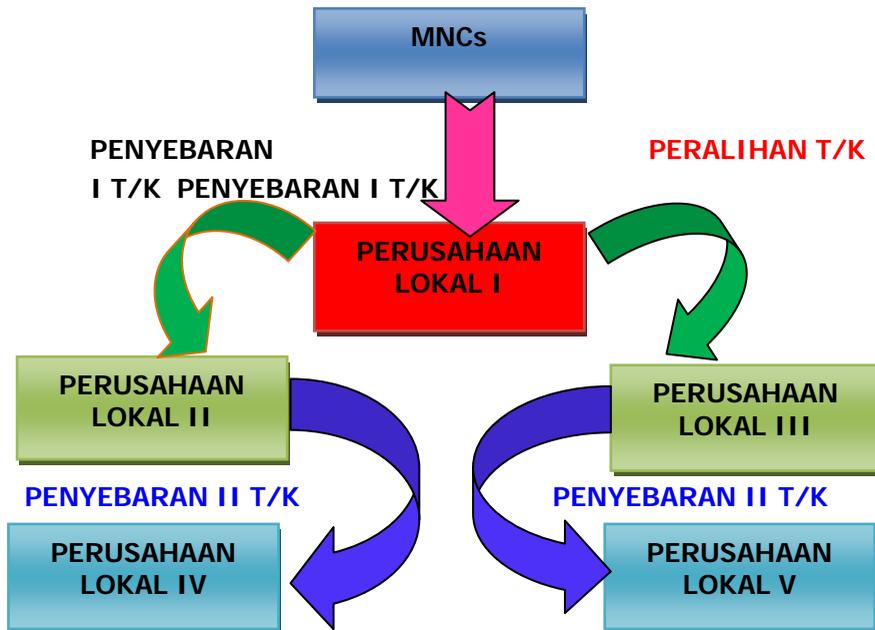
2. Perkembangan ekspor manufaktur

Di era Orde Baru telah menunjukkan bahwa peran PMA sangat penting dalam perkembangan ekspor manufaktur Indonesia, seperti tekstil, pakaian jadi, sepatu, dan alat-alat elektronik. Peran PMA tidak sekedar dalam pengembangan produk baru untuk ekspor, akan tetapi juga pemasaran, khususnya MNCs sudah punya jaringan distribusi regional atau dunia, yang sulit dikembangkan sendiri oleh kebanyakan perusahaan lokal. Hipotesisnya semakin banyak PMA pada industri nasional, semakin pesat perkembangan ekspor manufaktur Indonesia.

3. Perkembangan industri pendukung

Kehadiran PMA akan memicu perkembangan industri lokal yang membuat mesin, peralatan produksi, bahan baku siap pakai, komponen, onderdil, atau produk setengah jadi bagi kebutuhan produksi PMA. Tentu hal ini akan terjadi jika PMA menggunakan sebanyak mungkin komponen dan bahan baku. Hipotesisnya;

semakin banyak PMA, semakin maju perkembangan industri pendukung atau semakin tinggi tingkat “pendalaman” struktur sektor industri di Indonesia.



Gambar 2. Proses peralihan Teknologi dan Pengetahuan dari MNCs ke Perusahaan Lokal

#### 4. Pertumbuhan industri baru

Selain perkembangan industri pendukung, keberadaan PMA juga bisa memicu tumbuhnya industri-industri baru yang membuat produk jadi serupa yang dibuat oleh PMA. Hal ini bisa terjadi apabila ada diseminasi dan alih pengetahuan dan teknologi dari PMA ke perusahaan lokal lewat berbagai jalur. Dua di antaranya yang sangat penting adalah mobilisasi tenaga kerja dan kemitraan/keterkaitan produksi. Dalam hal mobilisasi tenaga kerja, mantan pekerja MNCs membuka usaha sendiri dalam bidang yang sama. Dalam kemitraan, perusahaan lokal bekas pemasok komponen untuk sebuah produk akhir tersebut. Teknologi atau pengetahuan yang diterima dari MNCs, selanjutnya bisa menyebar di antara sesama perusahaan lokal (Gambar 2). Jalur penyebaran dari satu perusahaan lokal ke perusahaan lokal lainnya bisa lewat aliansi strategi, seminar, publikasi, dan

lain-lain. Hipotesisnya adalah; semakin banyak PMA semakin banyak teknologi dan pengetahuan baru yang masuk ke industri nasional, semakin banyak perusahaan baru tumbuh, semakin tinggi tingkat diversifikasi industri nasional (Dreffield dan Love, 2007)

5. Peningkatan daya saing

Kehadiran PMA membuat persaingan pada industri nasional menjadi ketat, yang memaksa perusahaan-perusahaan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya, agar tidak tergusur dari pasar oleh PMA (terutama PMA yang berorientasi pasar domestik). Jikalau semua perusahaan lokal melakukan hal yang sama, niscaya tingkat daya saing dari industri nasional akan meningkat. Peningkatan daya saing juga akan tercapai lewat alih teknologi dan pengetahuan dari PMA. Hipotesisnya; semakin banyak PMA, semakin ketat persaingan, semakin banyak perusahaan lokal meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya, semakin baik daya saing industri nasional.

Dalam hubungan ini industri nasional bisa juga mengalami berbagai bentuk kerugian akibat didominasi PMA. Kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Banyak perusahaan lokal yang gulung tikar, karena kalah bersaing. Hipotesisnya; semakin banyak MNCs semakin banyak perusahaan lokal yang gulung tikar
- b. Pola perkembangan industri nasional yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia melainkan mengikuti keinginan PMA. Misalnya: Indonesia banyak memiliki tenaga kerja, tetapi perkembangan industri nasional yang didominasi oleh PMA cenderung semakin padat modal dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Indonesia merupakan negara agraris, namun PMA berorientasi pada produksi barang elektronik, bukan produk makanan, atau minuman. Bisa jadi PMA menggunakan semua SDP untuk membuat produk ekspor, sehingga industri nasional kekurangan SDP untuk melayani pasar domestik. Suatu misal; saat ini banyak perusahaan lokal pada subsektor industri makanan yang secara lokal sudah terkenal mereknya, dijual kepada pihak asing (tabel 5). Suatu contoh; produk kecap, sirup, dan saus merek ABC sekitar 65% sahamnya dimiliki oleh perusahaan Amerika serikat. Suatu keniscayaan, kelak perusahaan-perusahaan lokal yang dikuasai asing tersebut akan lebih berfokus pada pasar ekspor, sehingga akan mengurangi pasokan kepada pasar dalam negeri. Hipotesisnya; semakin besar dominasi MNCs semakin tinggi jumlah pengangguran, atau semakin tinggi impor untuk kebutuhan pasar domestik.
- c. Industri nasional sangat tergantung pada teknologi sederhana yang sudah standar dari PMA, karena PMA tidak berkeinginan mentransfer teknologi dasar atau melakukan R & D bersama dengan perusahaan lokal di Indonesia. Pada akhirnya,

perusahaan lokal hanya sebagai “tukang jahit” atau hanya mampu memproduksi komponen sederhana. Hipotesisnya; semakin besar dominasi PMA, semakin sedikit perusahaan lokal yang mampu membuat produk akhir secara mandiri.

- d. Munculnya enclave karena PMA sama sekali tidak punya hubungan bisnis dengan industri lokal atau sektor lain di Indonesia. Hal ini tidak memberi manfaat pada industri nasional, baik dalam alih teknologi dan pengetahuan maupun dalam hal produksi dan pemasaran. Bahkan enclave menciptakan/menambah kesenjangan dan kemiskinan di suatu daerah. Hipotesisnya; semakin banyak PMA yang beroperasi secara mandiri tanpa keterkaitan produksi dengan perusahaan-perusahaan lokal semakin besar kesenjangan dan kemiskinan di lokasi di mana PMA tersebut beroperasi.

Tabel 5. Perusahaan Makanan Yang dikuasai oleh PMA di Indonesia

Nama/Merek	Produk	PMA	Saham (%)	Pemilik
ABC	Kecap/Sirup/Saus	HJ Heinz (AS)	65	PT ABC Central Food
Sari Wangi	Teh	Unilever (Inggris)	100	PT Sari Wangi
Bango	Kecap	Unilever (Inggris)	100	PT Sakura Aneka Food
Taro	Makanan Ringan	Unilever (Inggris)	100	PT Rasa Murni Utama
Aqua	Air Minum kemasan	Danone (Perancis)	74	PT Tirta Investama
Helios, Nyam-Nyam	Biskuit	Camphel (AS)	100	PT Helios Arya Putra
ADES	Air Minum Kemasan	Coca Cola (AS)	100	PT Adel Alfindo Putra Setia
SGM	Susu/Makanan Bayi	Numico (Belanda)	82	PT Sari Husada
Dji Sam Soe, A Mild	Rokok Kretek	Philip Moris (AS)	100	PT HM Sampoerna

Sumber: Prabowo (2008)

### **G. Peluang Dan Kendala Perusahaan Domestik Di Dalam Industri Nasional**

Semakin liberalnya perdagangan dunia dan investasi, akan semakin lancar dan murah arus informasi lintas negara, dan semakin canggih dan murah transportasi internasional, ekonomi dunia termasuk proses produksi semakin terintegrasi (global). Hal ini niscaya melahirkan peluang pasar yang besar baik output maupun input (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, modal) bagi industri nasional. Namun terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh industri nasional saat ini;

1. Dapatkah perusahaan lokal meningkatkan ekspor di satu sisi, dan menguasai atau bersaing dengan produk impor di pasar domestik di sisi lain.
2. Dapatkah industri nasional memanfaatkan sepenuhnya teknologi dan tenaga ahli yang tersedia di dunia?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang memiliki daya saing tinggi (WEF, 2009), termasuk industri nasionalnya belum bisa menjadi salah satu pemain dunia, terutama untuk produk berteknologi menengah ke atas. Meskipun Indonesia telah memulai industri lebih awal dari Cina, namun sekarang Indonesia jauh ketinggalan dari Cina dalam sektor industri. Di pasar dalam negeri barang impor, resmi maupun selundupan semakin mendominasi, terutama dari Cina.

Fakta tersebut disebabkan karena banyaknya kendala yang dihadapi industri nasional. Selain masih lemah pula dalam penguasaan teknologi terutama yang disebabkan oleh lemahnya kegiatan R & D, dan masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, yang sampai saat ini sebagian besar hanya punya diploma dan sekolah dasar. Industri nasional juga dihadapkan pada buruknya infrastruktur dan logistik, pasokan listrik dan gas yang sering terganggu, upah tenaga kerja yang terus meningkat akibat peraturan upah minimum, kondisi tenaga kerja yang semakin buruk (disiplin rendah, etos kerja rendah, sering mogok), rendahnya jiwa kewirausahaan, birokrasi pemerintah yang bertele-tele dan mahal, perijinan yang lambat dan mahal (Tulus Tambunan, 2009)

Sebenarnya paling tidak secara teoritis peluang industri nasional dalam menghadapi perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi tambah besar dengan adanya PMA. Namun seperti telah dibahas di muka kemampuan industri nasional dalam meraih peluang tersebut tampaknya masih rendah. Contohnya; Indonesia telah memulai industri otomotif dengan proses perakitan sejak awal tahun 1970-an, dengan lahirnya PT Astra Internasional. Akan tetapi akhirnya bukan Indonesia, tetapi Thailand yang muncul sebagai pusat produksi mobil-mobil Jepang dan negara-negara produsen mobil lainnya untuk kawasan Asia Tenggara.

## **H. Kesimpulan**

Indonesia telah kehilangan momentum dalam mengembangkan sektor industri. Pada era 1970-an hingga 1980-an merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri sebagai salah satu pemain kunci di kawasan Asia dalam industri, pada saat Cina, Malaysia, dan Thailand masih belum kuat dalam pembangunan industri mereka. Saat ini bukan saja dengan Jepang, Korea selatan, Taiwan, tetapi juga dengan Cina, Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam industri Indonesia harus bersaing ketat. Satu hal yang pasti adalah tanpa infrastruktur dan logistik yang baik, SDM yang berkualitas, dan penguasaan teknologi yang didukung oleh kegiatan inovasi yang dinamis/agresif dan kerja sama yang intensif antara perguruan tinggi/lembaga R & D dan dunia usaha, Indonesia akan semakin tertinggal dengan industri-industri dari negara-negara tersebut.

Dalam hal peran PMA, tidak dapat dipungkiri bahwa PMA memang sangat penting bagi perkembangan industri nasional. Namun pertanyaan yang masih harus dijawab adalah: "Apakah Indonesia bisa memanfaatkan sepenuhnya keberadaan PMA?". Misalnya, apakah perusahaan domestik bisa menyerap teknologi yang dibawa PMA, atau industri nasional akan selamanya hanya menjadi "tukang jahit" saja bagi PMA.

### **Daftar Pustaka**

- Aitken, Brian J. dan Ann E. Harrison. 1999. *"Do Domestic Firm Benefit from Direct Foreign Investment Evidence from Venezuela"*. American Economic Review, 89 (3).
- Beva, A. dan S. Estrin. 2000. *Determinant of FDI in transition economies". Working Paper No. 342 Center for New Emerging Market, London Business School, London.*
- Campos, N. dan Y. Kinoshita. 2003. *"Why FDI go where it goes?. IMF Working Paper Series, Washington, D.C.:* International Monetary Fund.
- Drfffield, N, dan J.H. Love. 2007. *"Linking FDI motivation and host economy productivity effects: conceptual and empirical analysis"*. Journal of International Business Studies, 38 (3)
- Dunning, J.H. 1997. *Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: a search for an eclectic approach.* London: Macmillan.
- 1993. *Multinational Enterprises and the Global Economy.* Harlow: Addison-Wesley.
- Mudrajat Kuncoro. 2007. *Ekonomi Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030.* Andi, Yogyakarta
- Muhammad Teguh. 2010. *Ekonomi Industri.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tulus Tambunan. 2010. *Perkembangan Industri Nasional. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI Vol XVIII (1)*
- Tulus Tambunan. 2009. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang.* Ghalia Indonesia, Jakarta.